

ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah yang telah mengakar di Indonesia. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh KPK, kasus korupsi paling banyak berasal dari pemerintah kabupaten/kota dan Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mendeteksi korupsi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keterkaitan antara hasil audit pemerintahan berupa opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut audit dengan tingkat korupsi pada pemerintah kabupaten/kota, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, data penduduk dari Badan Pusat Statistik, dan data penanganan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan kejaksaan negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial opini audit memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat korupsi, sedangkan temuan audit dan tindak lanjut audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Secara simultan variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.

Kata kunci : Opini audit, temuan audit, tindak lanjut audit, tingkat korupsi.

ABSTRACT

Corruption is a problem that has deep roots in Indonesia. Based on reports issued by the KPK, most corruption cases come from regency / city governments and North Sumatra is one of the provinces that has a high level of corruption. An audit of government financial reports is an attempt to detect corruption. This research was conducted to analyze the relationship between the results of government audits in the form of audit opinions, audit findings, and audit follow-ups with the level of corruption in regency / city governments, particularly in North Sumatra Province. The data used in this study are secondary data in the form of audit results from the Supreme Audit Agency (Badan Pemeriksa Keuangan / BPK), population data from the Central Statistics Agency, and data on the handling of corruption cases by the Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi / KPK) and the public prosecutor's office. The results of this study indicate that partially the audit opinion has a significant and negative effect on the level of corruption, while the audit findings and audit follow-ups have no effect on the level of corruption. Simultaneously, these variables have a significant effect on the level of corruption.

Keywords: Audit opinion, audit findings, audit rectifications, corruption level.